

Penguatan kelompok usaha bersama (kub) perikanan tangkap (studi kasus desa latuhalat, kota ambon, provinsi maluku)

Lilian Sarah Hiariey, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20469528&lokasi=lokal>

Abstrak

Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap di Desa Latuhalat merupakan satu langkah baru dalam masyarakat nelayan untuk mengembangkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Sebagian besar masyarakat disitu menggantungkan kelangsungan hidupnya dari penghasilan laut dan dihadapkan pada masalah kemiskinan. Perlu dicari strategi yang mengarah pada peningkatan peranan lembaga masyarakat melalui penguatan KUB. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kapasitas KUB perikanan tangkap dalam meningkatkan usaha anggota; 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung dan menghambat penguatan KUB perikanan tangkap; dan 3) menyusun strategi dan program penguatan KUB perikanan tangkap. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif teknik Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dan kebutuhan KUB dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap. Faktor-faktor yang menghambat penguatan KUB adalah: (1) kondisi komunitas, (2) Belum optimalnya peningkatan usaha anggota; dan (3) Pemerintah dalam pemberian program belum bersifat partisipatif dan KUB belum dimanfaatkan untuk memberdayakan nelayan. Faktor-faktor pendukung antara lain: (1) potensi perikanan tangkap cukup besar; (2) terbentuknya kelembagaan KUB Risna dan Sibusibu; (4) dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program peningkatan produksi perikanan. Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain: (1) produksi hasil tangkapan menurun; (2) nelayan memiliki pola hidup konsumtif; (3) nelayan tidak memiliki ketrampilan dalam mengolah ikan saat ikan melimpah; (4) penerapan manajemen organisasi dan manajemen operasi produksi penangkapan rendah. Strategi yang dapat diusulkan KUB antara lain: (1) Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus; (2) Pendampingan manajemen kelembagaan; (3) Pengembangan jejaring; (4) Pengadaan pelatihan teknis penangkapan; (5) Pendampingan dan promosi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis kearifan lokal dan (6) Pengadaan sarana dan sarana penangkapan.